

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN ASET

Siti Mardiah¹, Jasman^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IKPIA Perbanas, Jakarta

*e-mail: sitimardiah27@outlook.com

DiPublikasi: 01/07/2021

<https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.14-24>

Abstract

This research aims to examine the influence of pressure, opportunity, rationalization, capability and integrity toward asset misappropriation through fraud star approach in governmental institution. This research used random sampling method and quantitative research design. Primary data is gathered from government employees through questionnaire, whether ministry or non-ministry with 100 respondents. Descriptive statistics, multiple regression model and classical assumption are used to analyze the data. The result of this research showed that rationalization and capability have positive and significant influence on asset misappropriation. Meanwhile, pressure, opportunity and integrity have no influence on asset misappropriation.

Keywords: Fraud Star, Asset Misappropriation, Government Institution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas dan integritas terhadap penyalahgunaan aset melalui pendekatan *Fraud Star* di instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling* dan desain penelitian kuantitatif. Data primer dikumpulkan dari pegawai pemerintah melalui kuesioner baik kementerian maupun non kementerian dengan jumlah responden 100 orang. Statistik deskriptif, model regresi berganda dan asumsi klasik digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi dan kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Sedangkan tekanan, peluang dan integritas tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset.

Kata Kunci : *Fraud Star*, Penyalahgunaan Aset, Instansi Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Di era disrupsi yang sedang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, tentunya akan lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Semua ingin mempertahankan, berkembang dan tumbuh, baik sektor publik maupun swasta. Perusahaan dihadapkan pada tiga pilihan besar, keluar dari persaingan, terus mempertahankan posisinya, atau maju sebagai yang terbaik. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, ada beberapa upaya yang harus dilakukan seperti meningkatkan kinerja, produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam melakukan upaya tersebut banyak sekali ancaman yang dihadapi, salah satunya adalah *fraud* atau kecurangan mulai dari yang kecil, kemudian membesar dan akhirnya akan merugikan perusahaan (Yusar, 2013). *Fraud* saat ini memang tidak bisa dihindari sehingga dapat ditemukan dalam berbagai kondisi, baik di sektor keuangan

maupun non keuangan. Praktik *fraud* sering terjadi pada perusahaan atau instansi besar maupun kecil dan juga pemerintah.

Dalam laporan survei yang dilakukan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia (2016), jenis penipuan yang paling umum adalah korupsi. Hasil ini menunjukkan perspektif yang berbeda dalam *Report to The Nation* (RTTN) yang dikeluarkan oleh ACFE (2016). Di RTTN, jenis penipuan yang umum adalah penyalahgunaan aset dengan 83,5 persen kasus dengan kerugian rata-rata \$125.000. *Fraud* adalah tindak pidana yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi pelakunya (Sasongko & Wijyantika, 2019). Ada tiga jenis korupsi di sektor swasta; penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Untuk sektor publik hanya ada satu jenis *fraud* yaitu korupsi itu sendiri, sedangkan penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan merupakan

bagian dari korupsi (Umar dkk., 2019).

Pada tahun 2018, skor Indonesia dalam *Corruption Perception Index* (CPI) menduduki peringkat 89 dari 180 negara yang diukur tingkat korupsinya, masih tertinggal dari Brunei, Malaysia, dan Singapura dalam masalah pemberantasan korupsi (*Transparency International*, 2018). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang melibatkan banyak perusahaan dan organisasi, termasuk instansi swasta atau pemerintah. Seperti pada survei integritas pada 2014 yang dilakukan KPK, seperti dilansir media online www.detik.com (Saputra, 2019), kasus penyalahgunaan aset yang dilakukan Kementerian Agama menempatkan Kementerian Agama pada peringkat terbawah kategori pelayanan publik. Salah satunya kasus korupsi pengadaan dana Al-Quran. Kerugian keuangan negara akibat korupsi pengadaan Al-Quran sebesar 27,056 miliar rupiah pada September 2012.

Penyalahgunaan aset juga terjadi di PT Barata Indonesia yang diketahui oleh Kementerian BUMN pada 2011. Dilansir dari www.kompas.com (Rastika, 2011), kasus ini dilakukan oleh Direktur Keuangan, Direktur Pemberdayaan SDM dan Direktur Utama, yang diduga menjual kekayaan negara berupa tanah. Penjualan tersebut diduga bertentangan dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pengalihan Aktiva Tetap BUMN. Korupsi ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai jual obyek pajak atas tanah PT Barata Indonesia yang merugikan negara lebih dari 22,690 miliar rupiah.

Kasus korupsi e-KTP berawal dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI membuat e-KTP. Sejak 2006, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan dana sekitar enam triliun rupiah yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Kependudukan Nasional (NIK) serta dana 258 miliar rupiah untuk biaya pemutakhiran data kependudukan pembuatan e-KTP berbasis NIK tahun 2010 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Indikasi kerugian negara dari kasus ini sebesar 2,3 triliun rupiah (Fadhil, 2018).

Dari beberapa bentuk *fraud* di atas, terlihat jelas bahwa *fraud* merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Dalam mendeteksi *fraud*, ada tiga teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebabnya. Ada teori *fraud*

triangle, *fraud diamond* dan *fraud star*. Cressey (1953) memperkenalkan konsep *fraud triangle* dengan tiga kriteria yang selalu ada dalam tindakan *fraud* yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Crowe Howarth (2011) memperkenalkan teori *fraud diamond* dengan menambahkan kemampuan pada penelitiannya. Setelah itu Umar (2016) mengedepankan konsep *fraud star* dengan menambahkan kurangnya integritas pada penelitiannya. *Fraud star* merupakan penyempurnaan dari dua teori *fraud*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fraud star* dalam *fraud* terkait dengan penyalahgunaan aset. *Fraud star* dipilih karena merupakan teori yang paling mutakhir dan lengkap dalam memeriksa laporan keuangan yang mengandung *fraud* dibandingkan dengan dua teori lainnya. Ini menjelaskan lima elemen penyebab penipuan. Kelima elemen tersebut terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas dan kurangnya integritas.

Penyebab pertama yang membuat seseorang melakukan kecurangan adalah tekanan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Manossoh (2017), tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud* yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Sebagian besar tekanan berasal dari lingkungan dan budaya kerja yang tidak menguntungkan yang telah tertanam di dalam organisasi. Hal tersebut dapat memberikan kecenderungan seseorang melakukan *fraud*. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013) menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Memang, pegawai akan cenderung melakukan *fraud* ketika merasa tertekan, baik itu tekanan yang berasal dari diri sendiri seperti kesulitan keuangan atau faktor lain yang bisa berasal dari organisasi seperti budaya organisasi dan lingkungan kerja. Namun seberapa besar pun tekanan yang dirasakan, kecenderungan melakukan *fraud* masih bergantung pada individunya, apakah ia akan melakukan *fraud* atau tidak (Faisal, 2013).

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah peluang. Peluang untuk melakukan kecurangan dapat terjadi ketika pengendalian internal yang dilakukan oleh organisasi kurang baik atau tidak efektif. Wilopo (2010) dalam Pristiyanti (2012) juga mengatakan bahwa semakin baik pengendalian internal maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud* di sektor

pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan *fraud*. Pengendalian internal yang efektif akan terintegrasi dengan perilaku anggota organisasi sehingga akan menekan perilaku tidak etis yang mungkin terjadi.

Rasionalisasi sering digunakan oleh pelaku untuk memperbaiki *fraud* yang dilakukannya. Sarpta (2018) mengatakan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Rasionalisasi digunakan sebagai pembenaran atas kesalahan atau *fraud* yang dilakukan oleh seseorang. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019) menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Albrecht dkk. (2011) menyatakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan *fraud* antara lain adalah aset tersebut sebenarnya milik saya, saya hanya meminjam dan akan melunasinya, tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, akan diselesaikan setelah masalah keuangan sudah selesai dan saya bersedia mengorbankan reputasi dan integritas saya selama itu meningkatkan standar hidup saya.

Cara yang sering dilakukan dalam penyalahgunaan aset adalah dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Kemampuan kemudian menjadi faktor keempat yang mempengaruhi

seseorang untuk melakukan *fraud*. Dalam kondisi tertentu sistem dan sumber daya yang buruk dapat membuat suatu lembaga berjalan dengan buruk dan begitu pula sebaliknya. Pada kondisi lain, pejabat yang memiliki kekuasaan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan juga akan membuat kinerja lembaga menjadi buruk sehingga akan meningkatkan *fraud* (Manossoh, 2017). Sedangkan menurut Yudistira dkk. (2017), otoritas tidak berpengaruh pada *fraud*. Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh seseorang telah dilaksanakan secara bijaksana untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga itu sendiri sehingga tidak timbul tindakan *fraud* atau penyalahgunaan aset akibat penyalahgunaan wewenang.

Dalam teori *fraud star*, faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang melakukan *fraud* adalah kurangnya integritas. Dalam penelitiannya, Umar (2016) mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan jika kehilangan integritasnya. Jika seseorang kehilangan integritasnya, maka dia akan kehilangan segalanya. Seseorang dengan integritas tinggi tidak akan mudah terjebak oleh situasi, depresi, atau iming-iming yang ditawarkan dengan melakukan *fraud*. Sebaliknya, Fitriani (2014) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap *fraud* karena integritas merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara akurat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul karena kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan... beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Sesuai dengan kesepakatan dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan kepada agen. Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu hanya dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Dalam pelaksanaannya, pegawai (agen) memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan (prinsipal), namun pegawai juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadinya.

Fraud Dalam Bentuk Penyalahgunaan Aset

Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional IIA (IIA, 2016) mendefinisikan *fraud* sebagai berikut.

any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage”.

Sementara itu, *Black's Law Dictionary* (1990) mendefinisikan *fraud* sebagai kumpulan semua cara yang beraneka ragam yang dapat dibuat oleh kecerdikan manusia, dan yang digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan penindasan kebenaran, dan mencakup

semua kegiatan, tipuan, kelecikan, atau menyembunyikan, dan cara tidak adil apa pun yang digunakan orang lain untuk menipu.

Dari beberapa definisi *fraud* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang disengaja antara lain berbohong, mencuri, memanipulasi, dan menggelapkan (mengubah aset perusahaan secara tidak benar untuk kepentingan sendiri). *Fraud* sendiri umumnya merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori yang dikenal dengan “*Fraud Tree*”. Ada kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan dapat diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen berupa salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Penipuan ini bisa berupa penipuan finansial atau non-finansial. Penyalahgunaan aset dapat diklasifikasikan sebagai penipuan tunai dan kecurangan pada inventaris dan aset lainnya, serta pencairan dana yang curang. Penyalahgunaan aset atau pengambilan aset secara ilegal dalam aktivitas sehari-hari disebut mencuri. Namun secara hukum, pengambilan aset secara ilegal oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau menangani aset tersebut, disebut penggelapan. Sedangkan korupsi memiliki beberapa arti. Menurut ACFE, korupsi dibagi menjadi konflik kepentingan, suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Dalam pasal yang tertuang dalam UU 20 Tahun 2002 yang mengacu pada UU 31 Tahun 1999, korupsi terjadi jika memenuhi tiga kriteria: (1) melawan hukum, (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan (3) merugikan keuangan negara atau ekonomi negara.

Tekanan

Fraud dapat dilakukan untuk kepentingan individu atau untuk organisasi itu sendiri. *Fraud* yang dilakukan pegawai, seperti penggelapan atau penyalahgunaan aset di suatu perusahaan biasanya hanya menguntungkan individunya saja. Tekanan itu sendiri dapat berdampak positif, tekanan dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan atau meningkatkan daya ingat

dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, tekanan dapat meningkatkan kinerja. Namun di sisi lain, tekanan bisa menjadi penyebab seseorang melakukan *fraud*. Jadi, ini menjadi salah satu elemen *fraud star*.

Albrecht dkk. (2012) membagi tekanan menjadi 4 kategori yaitu tekanan keuangan, tekanan karena perilaku, tekanan terkait pegawai, dan tekanan lainnya. Kebanyakan *fraud* melibatkan tekanan keuangan dan tekanan karena perilaku. Sedangkan Vona (2008) berpendapat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi tekanan pribadi, tekanan perusahaan atau tekanan eksternal.

Peluang

Menurut Albrecht dkk. (2012) sedikitnya terdapat 6 faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi, yaitu pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kurangnya komunikasi dan informasi, kurangnya jejak audit, dan sikap apatis. Pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan variasi kegiatan pengendalian bekerja sama untuk mengurangi peluang pegawai melakukan kecurangan. Peluang terjadinya *fraud* juga dapat terjadi jika manajemen tidak mampu memberikan penilaian terhadap kualitas kinerja pegawainya. *Fraud* juga sering terjadi karena korban tidak memiliki akses informasi yang dimiliki oleh pelaku dan sikap apatis. Oleh karena itu, untuk menghindari *fraud* seseorang harus meminta pengungkapan penuh. Orang yang apatis dan orang yang tidak memiliki kapabilitas seringkali menjadi korban *fraud* karena pelaku mengetahui bahwa orang tersebut mungkin tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan untuk mendeteksi bahwa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum.

Rasionalisasi

Faktor ketiga yang menyebabkan *fraud* adalah rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan atau semacam pembenaran oleh orang-orang yang merasa terjebak dalam situasi yang buruk (Albrecht, 2012). Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan tersebut bagi dirinya sendiri agar perbuatan yang dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Rasionalisasi yang sering digunakan adalah (1) organisasi berhutang pada saya, (2) saya hanya meminjam uang, akan saya kembalikan nanti, (3) tidak ada pihak yang

dirugikan, (4) saya memiliki hak yang lebih besar, (5) ini untuk tujuan yang baik, (6) semua mendapatkan kekayaan, mengapa saya tidak, (7) perusahaan mengizinkan ini, (8) mereka tidak memperlakukan saya dengan hormat, jadi saya ingin mendapatkannya sendiri. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa alasan yang digunakan untuk menutupi *fraud* adalah hal yang umum bagi para pelakunya. Jika dilakukan secara terus menerus maka rasionalisasi dapat menjadi penyebab utama terjadinya *fraud* di perusahaan. Hal ini harus menjadi perhatian perusahaan agar kebiasaan rasionalisasi para pelaku *fraud* tidak terus berkembang.

Kapabilitas

Kapabilitas artinya seberapa besar kekuatan dan kapasitas seseorang untuk melakukan *fraud* di dalam perusahaan (Apriliana dan Agustina, 2017). Kapabilitas adalah pengembangan dari elemen peluang. Ini adalah kemampuan pegawai untuk mengesampingkan pengendalian internal dengan mengembangkan strategi dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungan mereka. Misalnya, seorang pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengetahui aset perusahaan menjualnya kepada pihak lain atau mengambilnya untuk keuntungannya sendiri. Wolfe dan Hermanson (2004) mendefinisikan unsur kapabilitas dalam tindakan pelaku *fraud* sebagai posisi/otoritas, kecerdasan, ego/keyakinan, paksaan, penipuan dan ketahanan stres.

Integritas

Integritas adalah kualitas, ciri atau kondisi dimana seseorang menunjukkan kualitas, kerja keras dan kompetensi yang memadai dalam segala hal yang dilakukannya (Siahaan dkk., 2019). Seseorang yang berintegritas tidak pernah mengkhawatirkan konsekuensi dari tindakan atau sikapnya meskipun hal itu tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka yang berintegritas biasanya jauh dari niat kriminal karena semua yang mereka lakukan berdasarkan kebenaran dan etika (Umar, 2016). Mereka akan terus memegang teguh prinsip kebaikan dalam kondisi apapun dan dimanapun.

Menurut Bakri dan Said (2017) dalam Siahaan dkk. (2019) integritas dibagi menjadi dua elemen yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kepribadian seseorang. Itu bisa

menjadi prinsip, nilai, komitmen, atau keyakinan yang dianut oleh seseorang. Perilaku juga merupakan faktor internal yang berperan penting dalam pembentukan integritas, apakah seseorang mampu berperilaku baik dalam kondisi apapun atau mampu terguncang oleh kondisi yang ada di luar dirinya. Sedangkan faktor eksternal meliputi *reward* dan *punishment* yang diterapkan lingkungan terhadap perilaku atau kinerja seseorang.

Hipotesis

Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui teori keagenan, setiap individu hanya dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan benturan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam pelaksanaannya, pegawai (agen) memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan (prinsipal), namun pegawai juga berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadinya (Fitri dan Nadirsyah, 2019). Tekanan yang dirasakan pegawai bisa datang dari mana saja, baik internal maupun eksternal (Manossoh, 2017). Tekanan internal seringkali dirasakan oleh pegawai yang merasa bahwa gajinya tidak sesuai dengan penguasaannya. Selain itu, tekanan eksternal seperti besarnya hutang juga dapat mendorong seseorang melakukan *fraud*. Lingkungan kerja juga sering memberikan tekanan tinggi pada pelaku dalam melakukan *fraud*, terutama jika perusahaan memiliki budaya etis yang kurang baik (Faisal, 2013).

H1 : Tekanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset

Fraud bisa terjadi saat ada peluang bagi pegawai. Salah satu kondisi yang dapat menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan adalah pengendalian internal yang lemah. Wilopo dalam Pristiyanti (2012) mengatakan bahwa semakin baik pengendalian intern maka semakin kecil kemungkinan tingkat *fraud* di sektor pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan *fraud*. Pengendalian internal yang efektif akan terintegrasi dengan perilaku anggota organisasi sehingga akan menekan perilaku tidak etis yang mungkin terjadi.

Faktor lain yang dapat menciptakan peluang adalah kurangnya akses komunikasi dan informasi

dalam organisasi, manajemen yang tidak mampu membujuk pelaku *fraud*, dan sikap apatis yang ditunjukkan oleh manajemen dan pegawai tentang kecurangan kecil dan kurangnya jejak audit (Fitri & Nadirsyah, 2019). Ketika semua kondisi tersebut terjadi, maka *fraud* berupa penyalahgunaan aset akan semakin banyak dilakukan oleh pegawai. Apalagi jika *fraud* tidak dapat dideteksi selama periode audit, kemungkinan besar bukti atau jejak audit tersebut akan segera dihapus setelah auditor selesai masa auditnya (Umar, 2016).

H2 : Peluang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset

Rasionalisasi sering digunakan oleh para pelaku dan dipersiapkan bahkan sebelum melakukan *fraud* (Sarpta, 2018). Rasionalisasi sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian orang karena penyalahgunaan aset seringkali hanya disebut sebagai *fraud* kecil-kecilan yang mungkin tidak terdeteksi oleh perusahaan (Fitri dan Nadirsyah, 2019). Misalnya, pengambilalihan aset perusahaan berupa peralatan kantor atau fasilitas kantor yang sering digunakan pegawai dalam aktivitas sehari-hari sudah sangat umum terjadi. Pegawai merasa bahwa fasilitas dan aset diberikan sepenuhnya kepada mereka sehingga tidak ada perasaan bahwa aset atau fasilitas tersebut harus selalu digunakan untuk kebutuhan perusahaan tetapi dapat juga digunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing pegawai.

Selain itu, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan aset merupakan yang terkecil jika dibandingkan dengan jenis *fraud* lainnya (ACFE, 2016). Hal ini membuat manajemen kerap membiarkan penyalahgunaan aset terjadi begitu saja tanpa sanksi yang jelas padahal mereka tahu telah terjadi penyalahgunaan aset.

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset

III. METODE PENELITIAN

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan aset (Y). Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tekanan (X1), peluang (X2), rasionalisasi (X3), kapabilitas (X4) dan kurangnya integritas (X5).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik kementerian maupun non

Kapabilitas seseorang merupakan faktor kualitatif yang menurut Wolfe dan Hermanson (2004) merupakan pelengkap model *fraud triangle* Cressey. Kapabilitas berarti kekuatan dan kapasitas seseorang untuk melakukan *fraud* di lingkungan perusahaan. Pegawai yang memiliki kekuasaan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan akan membuat kinerja institusi berjalan buruk, sehingga akan meningkatkan *fraud* (Manossoh, 2017). Tidak hanya karena pegawai memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan *fraud*, kewenangannya juga meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset. Semakin luas kewenangan yang dimiliki seseorang maka semakin besar kemungkinan ia akan melakukan penyalahgunaan aset dalam organisasi.

H4 : Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset

Dalam teori *fraud star*, faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang melakukan *fraud* adalah kurangnya integritas. Dalam penelitiannya, Umar (2016) mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan jika kehilangan integritasnya. Jika seseorang kehilangan integritasnya, maka dia akan kehilangan segalanya. Seseorang dengan integritas tinggi tidak akan mudah terjebak oleh situasi, depresi, atau iming-iming yang ditawarkan dengan melakukan *fraud*. Salah satu tugas pegawai pemerintah adalah mengabdikan kepada masyarakat. Integritas yang tinggi sangat penting bagi pegawai pemerintah (Siahaan dkk., 2019). Jika telah menyalahgunakan aset, berarti tidak layak dipercaya oleh masyarakat karena telah mengkhianati masyarakat (Umar, 2016).

H5 : Integritas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset

kementerian. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik kementerian maupun non kementerian di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Daerah-daerah tersebut dipilih karena banyak instansi pemerintah yang berada di daerah tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data dengan mudah. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Artinya setiap elemen dipilih secara acak dari setiap elemen lainnya (Amirullah, 2015). Teknik *simple random sampling* digunakan karena ada batasan. Responden tidak tertarik untuk mengisi kuesioner jika harus menyebutkan instansinya karena alasan kerahasiaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dan tanpa perantara dari responden melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden dan diisi oleh responden. Kuesioner dibagikan kepada responden melalui platform online menggunakan formulir *Google*. Indikator dan instrumen variabel bebas kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini

dikembangkan oleh Siahaan dkk. (2019).

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik ini mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi (Muhson, 2015). Menurut Sugiyono (2017), statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran suatu data agar informasi lebih jelas dan mudah dipahami dilihat dari *mean*, *median*, *modus*, deviasi standar, nilai maksimum, dan nilai minimum. Perangkat lunak yang digunakan untuk teknik analisis ini adalah SPSS versi 24.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah baik itu kementerian maupun non kementerian. Peneliti mendapatkan sebanyak 100 responden. Deskripsi

variabel penelitian ini akan menampilkan tabel yang menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi jawaban tiap variabel hasil pengisian kuesioner oleh responden.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi
Tekanan	25,74	4,017
Kesempatan	19,20	3,879
Rasionalisasi	11,51	4,160
Kapabilitas	20,97	3,770
Integritas	21,83	4,283
Penyalahgunaan Aset	16,00	5,107

Nilai rata-rata variable tekanan berada di sekitar 25,74 dengan standar deviasi 4,017. Hasilnya dapat dikatakan bahwa tekanan di instansi pemerintah cenderung memiliki tekanan (rata-rata) yang cukup bagi para pegawai untuk melakukan penyalahgunaan aset.

Variabel peluang memiliki nilai rata-rata 19,20 dan standar deviasi 3,879. Sehingga pegawai di instansi pemerintah cenderung memiliki peluang yang cukup untuk melakukan penyalahgunaan aset.

Sedangkan rasionalisasi memiliki nilai rata-rata yang rendah yaitu 11,51 dengan standar deviasi 4,160. Artinya di instansi pemerintah, pegawai melakukan sedikit rasionalisasi ketika terjadi penyalahgunaan aset.

Nilai variabel kapabilitas berada di 20,97

dengan standar deviasi 3,770. Hasilnya dapat dikatakan bahwa pegawai di instansi pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penyalahgunaan aset.

Variabel integritas memiliki nilai rata-rata 21,83 dengan standar deviasi 4,283. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada instansi pemerintah pegawai memiliki integritas atau tidak terdapat kekurangan integritas yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan aset.

Dan untuk variabel penyalahgunaan aset terlihat bahwa nilai standar deviasi 6,107 lebih kecil dari nilai *mean*, nilai sampel berada di sekitar nilai rata-rata 16,00. Sehingga, penyalahgunaan aset terkadang terjadi di instansi pemerintah.

Tes Instrumen Penelitian

Uji validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *pearson product moment* dengan kaidah pengambilan keputusan jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa instrumen angket layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Nilai $r\text{-tabel}$ untuk total data 100 pada nilai signifikansi 5% adalah 0,195 (Sugiyono, 2009: 524). Semua item angket dalam penelitian ini telah lolos uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Dalam penelitian ini digunakan *composite reliability* dan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* berada di atas 0,60 (Sugiyono, 2009). Setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0,60 yang berarti setiap konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil Uji Hipotesis

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan mengamati plot probabilitas normal. Jika residual berasal dari sebaran normal, maka nilai sebaran akan berada disekitar garis lurus yang merupakan

garis dari sebaran normal (Sarwoko, 2005 dalam Wasef, 2010). Variabel dalam penelitian ini telah lolos uji normalitas. Selain itu, variabel independen atau independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinieritas karena nilai toleransinya $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas yang teridentifikasi dalam model regresi yang digunakan. Titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu atau titik-titik yang tersebar. sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi yang digunakan adalah Metode *Durbin Watson* (DW). Nilai DW pada penelitian ini adalah 1,418. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada diantara -2 dan 2.

Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Signifikansi
Tekanan	0,193	0,123
Peluang	0,056	0,651
Rasionalisasi	0,408	0,002
Kapabilitas	0,386	0,002
Integritas	0,179	0,146

Dependent Variable : Penyalahgunaan Aset

Tabel 2 menunjukkan bahwa *sig. value* tekanan 0,123. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 ditolak. Artinya tekanan tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013) dan Didi & Kusuma (2018) yang menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Tugas pegawai pemerintah adalah melayani masyarakat. Mereka harus bekerja secara sukarela untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski banyak yang menganggap bahwa gaji menjadi pegawai pemerintah itu kecil atau tidak sesuai, namun bukan tekanan yang bisa membuat mereka melakukan *fraud* yang akan merugikan masyarakat dan instansinya.

Seperti yang disajikan pada tabel 2, *sig. value* peluang adalah 0,651. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 ditolak. Artinya peluang tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana dkk. (2019) dan Fitri & Nadirsyah (2019) yang menyatakan bahwa peluang tidak berpengaruh terhadap *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem pengendalian yang diterapkan di suatu organisasi sudah efektif sehingga menyulitkan pelakunya. Selain itu, semakin baik sistem pengendalian internal maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin jarang terjadi. Hal ini mengakibatkan sedikitnya peluang yang tersedia bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan aset. Selain itu, dengan adanya prosedur dan regulasi yang ketat di

lembaga pemerintahan, tidak semua orang dapat terlibat dalam kegiatan pemerintahan kecuali mereka yang memang memiliki tanggung jawab.

Tabel 2 menunjukkan bahwa *sig. value* rasionalisasi adalah 0,002. Nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga H_0 diterima. Artinya rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dkk. (2019), Irphani (2017), Faradiza (2019), dan Manossoh (2017) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Rasionalisasi sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian orang karena penyalahgunaan aset sering disebut sebagai *fraud* kecil yang mungkin tidak terdeteksi oleh perusahaan. Misalnya, sangat umum pegawai pemerintah menggunakan aset dan fasilitas untuk kepentingannya sendiri. Pegawai merasa bahwa fasilitas dan aset diberikan sepenuhnya kepada mereka sehingga tidak ada perasaan bahwa aset atau fasilitas tersebut harus selalu digunakan untuk kebutuhan perusahaan tetapi dapat juga digunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing pegawai.

Variabel kapabilitas seperti yang disajikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa *sig. value* kapabilitas yaitu 0,002. Nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga H_0 diterima. Artinya kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dkk. (2019), Irphani (2017), dan Fitri & Nadirsyah (2019) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap *fraud*. Pegawai yang memiliki kekuasaan dan melakukan

penyalahgunaan kekuasaan akan membuat kinerja institusi berjalan buruk, sehingga akan meningkatkan *fraud* (Manossoh, 2017). Tidak hanya karena pegawai memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan *fraud*, kewenangannya juga meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset. Semakin luas kewenangan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kemungkinan ia akan melakukan penyalahgunaan aset dalam organisasi. Umumnya masyarakat yang memiliki kapabilitas juga pandai memanfaatkan kelemahan pengendalian internal perusahaan untuk mencari celah untuk melakukan *fraud*.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa *sig. value* integritas adalah 0,146. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 ditolak. Artinya integritas tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana dkk. (2019) dan Fitri & Nadirsyah (2019) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa integritas bukanlah penyebab utama terjadinya *fraud* berupa penyalahgunaan aset di instansi pemerintah. Selain integritas, rasionalisasi dan kapabilitas seseorang untuk melakukan *fraud* lebih kuat untuk mendorong seseorang melakukan *fraud*. Kemungkinan lainnya adalah indikator yang digunakan untuk mengukur integritas masih belum sesuai dengan yang seharusnya digunakan. Skousen dkk. (2009) dalam Fitriany (2014) mengatakan bahwa integritas merupakan salah satu penyebab *fraud* yang paling sulit diukur sehingga memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam mengukur tingkat integritas

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel tekanan tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset. Tugas pegawai pemerintah adalah melayani masyarakat. Mereka harus bekerja secara sukarela untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski banyak yang menilai bahwa gaji menjadi pegawai pemerintah kecil atau tidak sesuai, namun bukan tekanan lah yang dapat menyebabkan mereka melakukan kecurangan yang akan merugikan masyarakat dan institusi mereka.

Variabel peluang tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem pengendalian yang diterapkan dalam suatu organisasi yang telah efektif sehingga menyulitkan pelakunya. Selain itu, dengan adanya prosedur dan peraturan yang ketat di lembaga pemerintah, tidak semua orang dapat terlibat dalam kegiatan pemerintahan kecuali yang memang memiliki tanggung jawab.

Variabel rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Rasionalisasi sudah menjadi hal yang lumrah bagi

sebagian orang karena penyalahgunaan aset sering disebut sebagai penipuan kecil yang mungkin tidak terdeteksi oleh perusahaan. Pegawai merasa bahwa fasilitas dan aset diberikan sepenuhnya kepada mereka sehingga tidak ada perasaan bahwa aset atau fasilitas tersebut harus selalu digunakan untuk kebutuhan perusahaan tetapi dapat juga digunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing pegawai. Variabel kapabilitas berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Pegawai yang memiliki kekuasaan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya juga akan membuat kinerja institusi berjalan buruk, sehingga akan meningkatkan kecurangan. Tidak hanya karena pegawai memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan *fraud*, kewenangannya juga meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset. Semakin luas kewenangan yang dimiliki seseorang maka semakin besar kemungkinan ia akan melakukan penyalahgunaan aset dalam organisasi.

Variabel integritas tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset. Hal ini menunjukkan bahwa integritas bukanlah penyebab utama terjadinya *fraud* berupa penyalahgunaan aset di instansi pemerintah. Kemungkinan lainnya adalah indikator yang digunakan untuk mengukur integritas masih belum sesuai dengan yang harus digunakan karena integritas merupakan salah satu faktor penyebab

fraud yang paling sulit untuk diukur sehingga memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam mengukur tingkat integritas.

Batasan

Penelitian ini tidak merepresentasikan persepsi pegawai instansi pemerintah secara merata di setiap daerah karena responden tidak berminat untuk mengisi kuesioner jika harus menyebutkan instansinya. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menggeneralisasi hasil penelitian ini. Keterbatasan jumlah responden tentunya dapat menurunkan derajat keterwakilan pegawai pemerintah yang bukan responden dalam penelitian ini.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak lagi indikator-indikator yang dapat dikembangkan dari variabel-variabel yang terkait dengan *fraud* berupa penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan atau korupsi, seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas dan integritas. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kualitatif dalam metodologi penelitian atau menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian akan terjadi variasi atau keragaman dan hasilnya lebih meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., C. O. Albrecht, C. C. Albrecht, dan M. F. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. 4th Edition. South-Western: Cengage Learning
- Amirullah. (2015). Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis dan Teknik). *Bayumedia Publishing Malang*, 17(1993), 100–108. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Aprilia, A. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5259>
- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.4036>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse 2016 Global Fraud Study*. Retrieved from <https://www.acfe.com/rtnn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf>
- Cohen, J. (1992). *Quantitative Methods in Psychology: A Power Primer*.
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Fadhil, H. (2018, December 10). KPK: Negara Rugi Rp 2,3 T dari e-KTP, tapi Baru Balik Rp 500 M. *Detiknews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4337444/kpk-negara-rugi-rp-23-t-dari-e-ktp-tapi-baru-balik-rp-500-m>
- Faisal, M. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V2I1.1181>
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–22. Retrieved from <http://ejournal.uin->

- suka.ac.id/febi/ekbis/article/view/1060/621
- Fitri, F., & Nadirsyah. (2019). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), dan Kapabilitas (Capability) terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Imiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 412–427. Retrieved from <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12575#>
- Fitriany, E. D. P. (2014). *Analisis Pengaruh Integrity dan Corporate Governance terhadap Probbilitas Fraud*. Universitas Indonesia. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S56627-Eroz Dany Perdana>
- Institute Internal Auditors. (2016). *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. Retrieved from www.globaliia.org
- Irphani, A. (2017). *Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan Dalam Pengelola Keuangan terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro)*. University of Lampung. Retrieved from [https://digilib.unila.ac.id/25440/20/tesis tanpa bab pembahasan.pdf](https://digilib.unila.ac.id/25440/20/tesis%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf)
- Manossoh, H. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11649>
- Mazkiyani, N., & Handoyo, S. (2017). Audit Report Lag of Listed Companies in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 77–95. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art5>
- Mohammad Rezaei, F., & Mohd-Saleh, N. (2018). Audit Report Lag: The Role Of Auditor Type and Increased Competition in The Audit Market. *Accounting & Finance*, 58(3), 885–920. <https://doi.org/10.1111/acfi.12237>
- Muhson, A. (2015). *Teknik Analisis Kuantitatif 1 Teknik Analisis Kuantitatif*. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- Mulyadi, M. (2018). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Nisa, K., Oktafiana, N. F., & Permata Sari, S. (2019). *Fraudulent Financial Statement Ditinjau dari Model Fraud Pentagon Horwath*. Purworejo. Retrieved from <http://eproceedings.umpwr.ac.id/index.php/urecol9/article/viewFile/865/757>
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 1–14. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/707>
- Rastika, I. (2011, November 21). Penjualan Aset PT Barata Indonesia Diketahui Kementerian BUMN. *Nasional Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/21/14365711/Penjualan.Aset.PT.Barata.Indonesia.Diketahui.Kementerian.BUMN>
- Kountur, Ronny. (2009). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Percetakan Buana Printing.
- Saputra, A. (2019, March 17). Skandal Bertubi-tubi di Kemenag, Kasir pun Bisa Korupsi Rp 3,3 Miliar! *Detiknews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4471169/skandal-bertubi-tubi-di-kemenag-kasir-pun-bisa-korupsi-rp-33-miliar>
- Sarpta, R. B. (2018). *Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Beneish M-Score Model (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)*. Universitas Bandar Lampung. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/31452/3/Skripsi Tanpa Bab Pembahasan.pdf](http://digilib.unila.ac.id/31452/3/Skripsi%20Tanpa%20Bab%20Pembahasan.pdf)
- Sasongko, N., & Wijyantika, S. F. (2019). Faktor Resiko Fraud Terhadap Pelaksanaan Fraudulent Financial Reporting (Berdasarkan Pendekatan Crown ' s Fraud Pentagon Theory), 4(1), 71–81. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*
- Siahaan, M., Umar, H., & Br, R. (2019). Fraud Star Drives to Asset Misappropriation Moderated by Internal Controls 欺诈之星驱动资产内部控制导致的盗用. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 54(4), 1–10.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Transparency International. (2018). *Corruption Perceptions Index 2018 : Global Scores*.
- Umar, Haryono. (2016). *Corruption The Devil*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Wicaksana, E. A., Suryandari, D., & Semarang, U. N. (2019). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di bursa efek indonesia, 4(1), 44–59.
- Yudistira, G. I. N. A. R., Sujana, E., & Yuniarta, A. G. (2017). Pengaruh Aspek Tekanan, Penegakan Peraturan, Rasioanlisasi, dan Wewenang Pegawai terhadap Fraud (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Karangasem). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 126–131. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/2852/2643>